



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2 TAHUN 2022

**BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN
(BPPP) AMBON**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja triwulan II tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja triwulan II Tahun 2022 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Triwulan II Tahun 2022. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Triwulan II Tahun 2022, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang terdiri dari 6



sasaran kegiatan dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2022, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2022 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, koordinasi pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Ambon, 13 Juli 2022

**Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon**



Abubakar

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Abubakar S.St.Pi, M.Si

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekretaris :

Moh. Arief Hidayat A.Md, S.Pi

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Wahyu Retno Aris S.St.Pi

Dessy Rompis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	6
C. Tugas dan Fungsi BPPP Ambon	6
D. Keragaan SDM BPPP Ambon	9
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kerja Tahun 2022.....	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
D. Pengukuran Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Prestasi Kinerja	29
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	30
C. Akuntabilitas Keuangan	61
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Ambon	62
BAB IV PENUTUP	67
A. Capaian Kinerja Utama	67
B. Permasalahan dan Rekomendasi	70
LAMPIRAN	

IKTISAR EKSEKUTIF

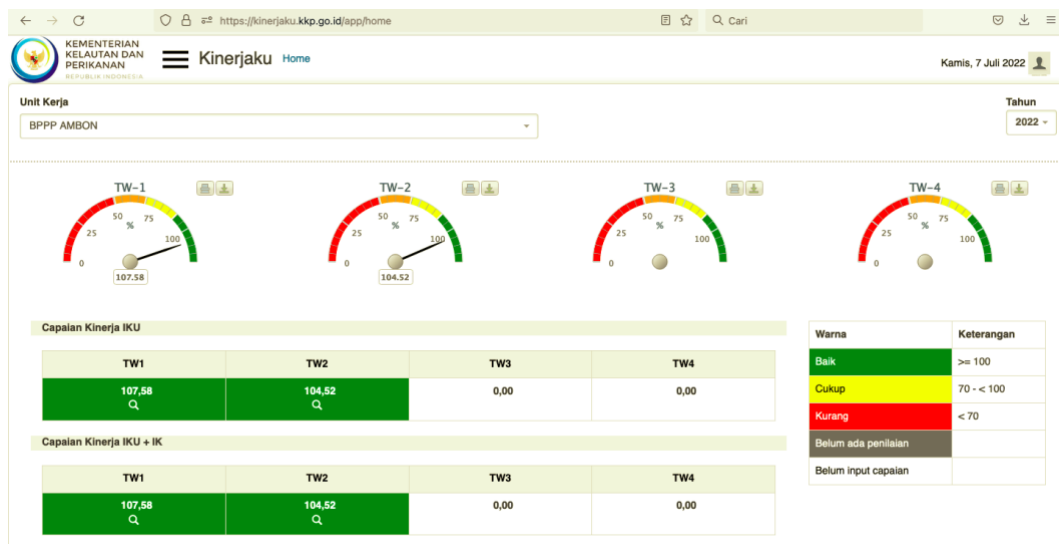
Sasaran kinerja yang dicapai pada triwulan II tahun 2022 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah menetapkan 6 (Enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2022. Dari 6 (Enam) Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 22 (Dua puluh dua) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon triwulan II tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard*



dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat triwulan II tahun 2022 sebesar 104,52%.



Dashboard Kinerja BPPP Ambon

Selama triwulan II tahun 2022, dari 8 IKU yang menjadi target BPPP Ambon, dan semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan ada 2 IKU yang merupakan IKU tahunan akan tetapi sudah terealisasi pada triwulan ini.



Capaian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW 2	REALISASI	% REALISASI TAHUN
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	65	0	0	0
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.719	796	796	29,28
		3	Nilai PNBSP Satker BPPP Ambon (Rupiah Milyar)	0,405	0,08	0,25	61,73
2	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	4	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	12	0	0	0
		5	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2	0	0	0
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.941	1.540	1.540	52,36
		7	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	67	5	5	7,46
		8	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	215	110	110	51,16
		9	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	550	0	0	0
4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa)	1	0	0	0
		11	Jumlah Percontohan Penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (Produk)	1	0	0	0
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	0	1	100
		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	1	1	100
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM							
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	0	0	0
		15	Unit Kerja BPPP Ambon yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	0	0	0
		16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	92	0	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW 2	REALISASI	% REALISASI TAHUN
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	86	86	100	116,28
		18	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	76	72	73,47	96,67
		19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2021 (%)	≤1	0	0	0
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	70	0	100	100
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	89	0	0	0
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	86	0	0	0

Secara umum kinerja BPPP Ambon sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan target nilai IP ASN sebesar 76, perlu mendapatkan perhatian, mengingat komposisi dan kualifikasi Pendidikan pegawai mempengaruhi terhadap pencapaian IKU IP ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi pemenuhan nilai IP ASN kepada seluruh pegawai BPPP Ambon meliputi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai.

2. IKU dengan Target Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN,



dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/ MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network* / komunikasi, sedangkan *society* 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society* 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan.

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*transfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja



antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (satuan kerja).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2022 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PUSLATLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP khususnya program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSLATLUH KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2022 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2022, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Triwulan II Tahun 2022 memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala PUSLATLUH KP selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Triwulan II Tahun 2022.
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

C. Tugas dan Fungsi BPPP Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Ambon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;



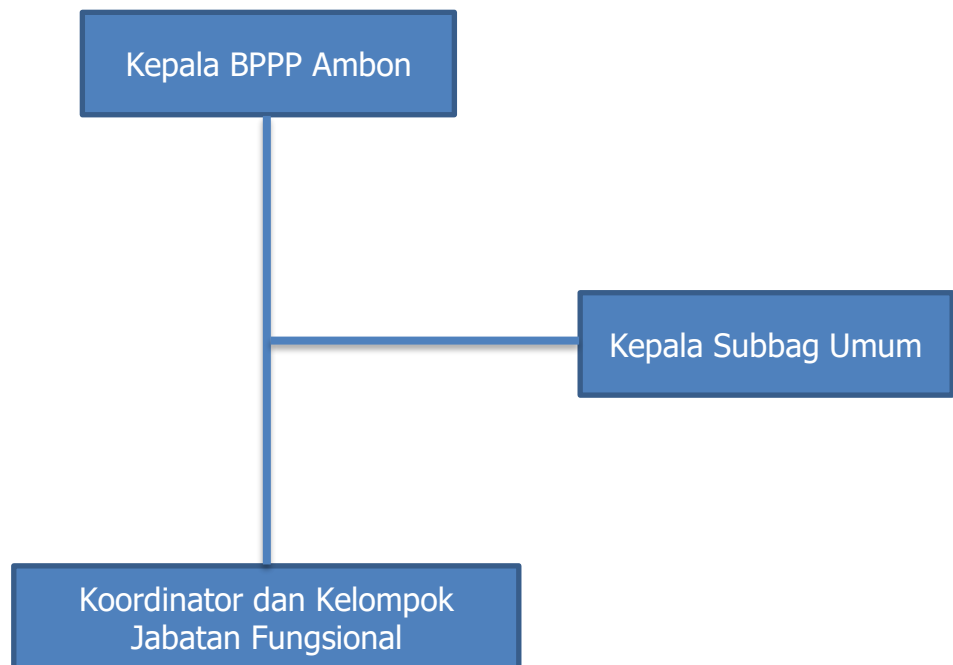
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Umum dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Kelompok jabatan fungsional dengan tugasnya memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.



Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Struktur Organisasi di BPPP Ambon dapat dilihat pada Gambar:



Struktur Organisasi BPPP Ambon

D. Keragaan SDM BPPP Ambon

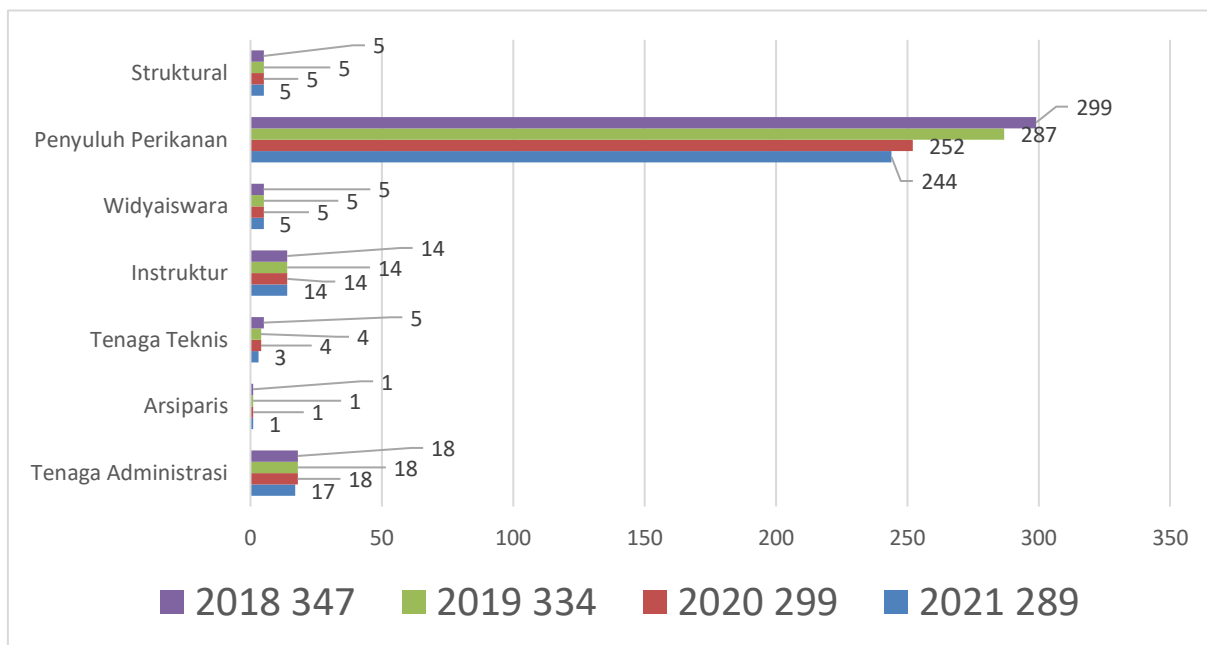
Jumlah pegawai di BPPP Ambon per 05 Juli 2022 sebanyak 432 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPP Ambon

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	Kepala Balai / Eselon III	1 Orang
2	Subbag Umum	1 Orang
3	Sub Bagian Tata Usaha	
	Kepegawaian	2 Orang
	Keuangan	3 Orang
	Persuratan	1 Orang
	Rumah Tangga dan Perlengkapan	2 Orang
	Teknisi / Pengadm. Sarana Kantor	7 Orang
4	Staf Program dan Monev	1 Orang
5	Staf Pelatihan	2 Orang
6	Staf Penyuluhan	2 Orang
7	Fungsional Tertentu :	
	Analisis Perencana	1 Orang
	Analisis Kepegawaian	1 Orang
	Pranata Keuangan APBN Mahir	1 Orang
	Widyaiswara	4 Orang
	Instruktur	14 Orang
	Penyuluh	254 orang
8	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	6 orang
9	Tenaga Kontrak	
	Tenaga Teknis	3 orang
	Pramubakti	5 orang
	Pengemudi	2 orang
	Petugas Keamanan	4 orang
	Tenaga Kesehatan (Perawat)	1 orang
	Penyuluh Perikanan Bantu	114 orang
	Jumlah Total	432 Orang



Komposisi pegawai BPPP Ambon dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Komposisi pegawai BPPP Ambon tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Triwulan II Tahun 2022:

- 1) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

- a. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;

- b. Bab I – Pendahuluan,

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

- c. Bab II – Perencanaan Kinerja,

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

- d. Bab III –Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

e. Bab IV – Penutup,

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

f. Lampiran,

Perjanjian kinerja,

Lampiran yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam perencanaan strategis periode lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 berisi langkah-langkah strategis yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka menunjang visi

Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :

1. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan menggunakan visi Presiden.

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sejalan dengan Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP, visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah menggunakan Visi BRSDM, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Ambon menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;
- 4) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan

menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sasaran Program

Renstra BPPP Ambon tahun 2020 – 2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPP Ambon sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi

dalam empat perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

- 1) Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.

Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan adalah tujuan yang ingin dicapai BPPP Ambon pada masa kerja 5 tahun mendatang. Keberhasilan pencapaian tujuan ini ditandai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Tersuluhnya kelompok pelaku utama/usaha sebanyak 14.137 kelompok selama 2020-2024;
 - b) Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya sebanyak 319 kelompok selama 2020- 2024;
 - c) Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan sebanyak 485 kelompok selama 2020-2024.
- 2) Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi hasil inovasi riset kelautan dan perikanan. Indikator yang ditargetkan adalah adanya desa mitra yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset dan inovasi BRSDM sebanyak 1 desa setiap tahun selama 2020-2024;

3) Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.

Meningkatnya kompetensi SDM KP adalah tujuan utama pelatihan dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Ambon. Untuk mengetahui pencapaian tujuan itu, indikator yang digunakan selama 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri sebanyak 60%.
- b) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) sebanyak 76 orang.
- c) SDM KP yang dilatih sebanyak 8.765 orang.
- d) Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 1.300 orang.
- e) Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan sebanyak 27 unit.
- f) Sarana dan prasarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 4 unit.
- g) Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat sebanyak 5 lembaga.
- h) Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit) sebanyak 2.720 unit.

4) Tatakelola pemerintahan yang baik

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ingin menjadi instansi yang memiliki kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu, tujuan

ini adalah mutlak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dengan indicator keberhasilan sebagai berikut :

- a) Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon sebesar 72.
- b) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon sebesar 82%.
- c) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon adalah 88 atau baik.
- d) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK tahun lalu dibandingkan realisasi anggaran TA. lalu sebesar ≤ 1 %.
- e) Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon sebesar minimal 86.

5. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 5 (lima) Provinsi di Indonesia. Wilayah kerja BPPP Ambon yaitu propinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu

pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.



BPPP Ambon juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 4 (empat) Provinsi meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. BPPP Ambon bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Ambon dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) BPPP Ambon berada pada posisi yang sangat strategis di Kota Ambon, tepatnya di Jl. Martha Alfons, Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon, sebelah Utara berbatasan

dengan Universitas Pattimura, sebelah barat dicapai dengan jalur darat melalui Wayame dan Rumah Tiga, Sebelah Timur dicapai dengan kapal feri penyebarangan Galala-Poka

- 2) Memiliki *workshop* yang lengkap untuk setiap bidang pelatihan;
- 3) BPPP Ambon memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar;
- 4) Memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya (5 orang widyaiswara, 14 orang instruktur, 3 orang tenaga teknis/pelatih, 244 orang penyuluh perikanan PNS dan 7 orang PPPK Penyuluh Perikanan serta 116 orang penyuluh perikanan bantu);
- 5) Sebagian besar SDM BPPP Ambon memiliki usia muda yang produktif;
- 6) BPPP Ambon tersertifikasi ISO 9001:2015;
- 7) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu ;
- 8) Memiliki akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat *Basic Safety Training* (BST);
- 9) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 10) BPPP Ambon sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 1 sehingga dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri;
- 11) SDM Asesor BPPP Ambon sebanyak 39 orang sehingga akan mampu

- melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak;
- 12) BPPP Ambon mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu;
 - 13) BPPP Ambon mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang layak dipasarkan;

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Ambon memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :

- 1) Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;
- 2) Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
- 3) Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandarisasi.
- 4) Kurangnya program pengembangan SDM pelatih.

Sedangkan aspek penyelenggaraan penyuluhan :

- 1) Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- 2) Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum

memadai;

- 3) Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- 4) Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- 5) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- 6) Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- 7) Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

B. Rencana Kerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Strategis, BPPP Ambon didukung dengan anggaran sebesar Rp 51.608.987.000. Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan :

- a. Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Rp. 60.000.000
- b. Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kaji Terap) Rp. 120.000.000
- c. Kelompok Pelaku Utama/Usaha Yang Mendapatkan Pendampingan Dari Penyuluhan KP Rp. 4.761.580.000

- d. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Rp. 54.019.000
- e. Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Rp. 550.000.000
- f. Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih Rp. 1.918.834.000
- g. Layanan Perkantoran Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Rp. 43.684.243.000
- h. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp. 59.000.000
- i. Layanan Umum Rp. 305.100.000
- j. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Rp. 39.200.000
- k. Layanan Manajemen Keuangan Rp. 40.211.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PANRB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik,



- b. Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada analisis *Balance Score Card* (BSC). Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2022 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada Januari 2022. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022.

Adapun Indikator Kinerja Utama dengan rincian dan target pada tahun 2022, sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPPP Ambon tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	65
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.719
		3	Nilai PNPB Satker BPPP Ambon (Rupiah Milyar)	0,405
2	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	4	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	12
		5	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.941
		7	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	67
		8	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	215
		9	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	550

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa)	1
		11	Jumlah Percontohan Penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (Produk)	1
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM				
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		15	Unit Kerja BPPP Ambon yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	92
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	86
		18	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	76
		19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2021 (%)	≤1
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	70
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	86

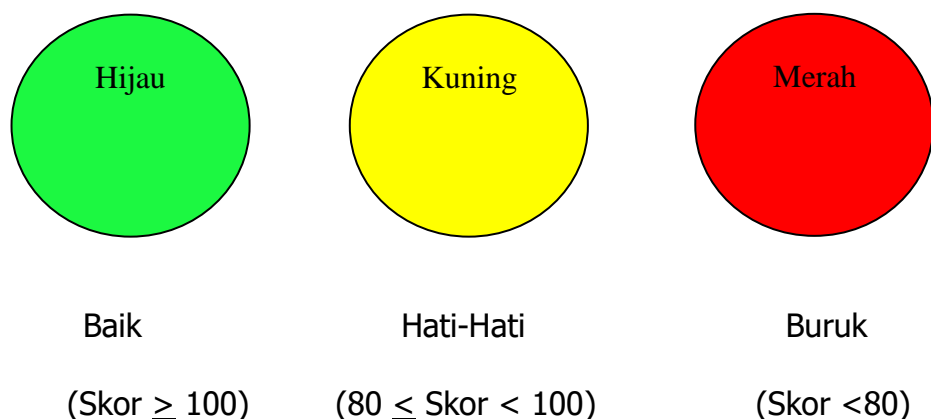
D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon triwulan II Tahun 2022, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.

Adapun status indeks capaian IKU seperti gambar sebagai berikut :



Status indeks capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Score Card* (BSC).

2. Metode Pengukuran Kinerja

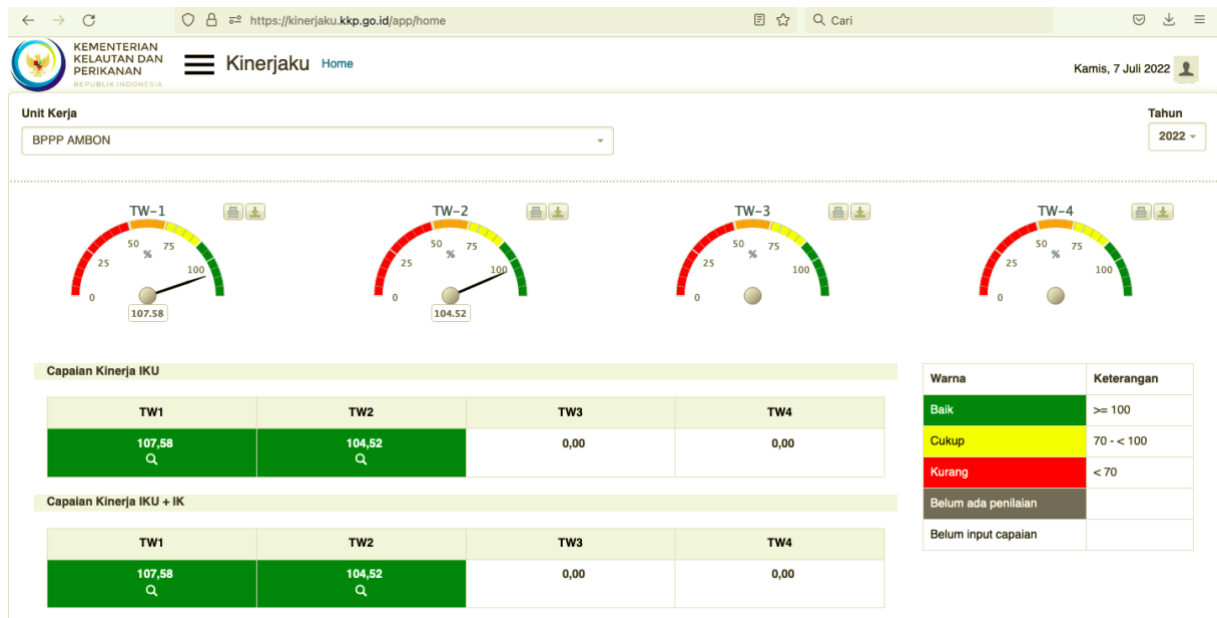
Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Ambon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor 21/BPPP.AMB/OT.210/I/2022 tentang Tim Penyusunan laporan Kinerja BPPP Ambon Tahun 2021 dan Triwulanan Tahun 2022. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua bagian lingkup BPPP Ambon. Berdasarkan laporan bagian penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Triwulan II tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat tahun 2022 sebesar 104,52%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama triwulan II tahun 2022, dari 7 IKU yang menjadi target BPPP Ambon, dan semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan ada 2 IKU yang merupakan IKU tahunan akan tetapi sudah terealisasi pada triwulan ini.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Ambon yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2022 dapat tercapai. BPPP Ambon pada triwulan II tahun 2022 memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Capaian IKU triwulan II tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW 2	REALISASI	% REALISASI TAHUN
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	65	0	0	0
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.719	796	796	29,28
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,405	0,08	0,25	61,73
2	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	4	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	12	0	0	0
		5	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widy di BPPP Ambon (Paket)	2	0	0	0
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.941	1.540	1.540	52,36
		7	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	67	5	5	7,46
		8	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	215	110	110	51,16
		9	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	550	0	0	0
4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa)	1	0	0	0
		11	Jumlah Percontohan Penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (Produk)	1	0	0	0
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	0	1	100
		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	0	1	100
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM							
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	0	0	0
		15	Unit Kerja BPPP Ambon yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	0	0	0
		16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	92	0	0	0
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	86	86	100	116,28
		18	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (Indeks)	76	72	73,47	96,67
		19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2021 (%)	≤1	0	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW 2	REALISASI	% REALISASI TAHUN
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	70	0	100	100
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	89	0	0	0
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	86	0	0	0

Salah satu misi BRSDMKP dalam mendukung visi Kementerian adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Ambon sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 3 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1 : Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap Di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon

(%), IKU 2 : Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih di BPPP Ambon (Orang)
dan IKU 3 : Nilai PNBPN Satker BPPP Ambon (Rupiah Milyar)

Indikator Kinerja 1

Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (%)

Merupakan indikator yang menggambarkan Jumlah lulusan pelatihan yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan di DUDI.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih. Sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilatih sehingga pencapaian pada triwulan 2 tahun 2022 masih 0 orang.

Analisis Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain oleh:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan pada awal tahun, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM calon maupun penerima program bantuan KKP dan untuk mendukung program-program prioritas KKP.
2. Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk lulusan pelatihan penangkapan ikan (BST) dan perusahaan olahan hasil perikanan.
3. Pendampingan bagi lulusan pelatihan oleh penyuluh di Kab/kota sehingga hambatan dalam usaha kelautan dan perikanan dapat diatasi.

Indikator Kinerja 2

Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilatih dibidang kelautan dan perikanan.

Realisasi IKU pada tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 6.784 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015 sebanyak 2.992 orang, pada tahun 2016 sebanyak 840 orang, pada tahun 2017 sebanyak 840 orang, pada tahun 2018 sebanyak 1.712 orang, pada tahun 2019 sebanyak 400 orang, pada tahun 2020 sebanyak 1.165 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 1.393 orang, Sampai akhir Triwulan 2 Tahun 2022 sudah dilakukan pelatihan masyarakat dengan metode luring dan daring sebanyak 796 orang. Metode daring ini juga dibantu oleh para penyuluh dilapangan untuk mengawal dan membantu para peserta pelatihan dalam melakukan proses pelatihan baik dalam mengakses aplikasi SiPintar sebagai sarana digital pelatihan mulai dari pendaftaran sampai akses bahan ajar/modul.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah tersedianya pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan, dan sarana prasarana yang terstandar, serta tersedianya database penyelenggaraan pelatihan melalui SIMLAT KP sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pelatihan oleh BPPP Ambon.



Pelatihan Basic Safety Training

Pelatihan Diversifikasi Hasil Perikanan Di Kabupaten Maluku Tengah



Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Buatan Di Kabupaten Seram Bagian Timur

Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Di Kab. Pulau Morotai





Pelatihan Pengolahan Tuna Di Kab. Pulau Morotai

Indikator Kinerja 3

Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Milyar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Cara perhitungan IKU tersebut dengan menjumlahkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan yang tercatat pada aplikasi Simponi BPPP Ambon.

Sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 BPPP Ambon telah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 258.250.000 atau 0,25 Milyar.

Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya kaji terap pelatihan KP terdapat 2 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 4 : Lulusan Pelatihan Yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) di BPPP Ambon (Orang) dan IKU 5 : Tersedianya Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Orang).

Indikator Kinerja 4

Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (Usaha Rintisan) di BPPP Ambon (orang).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) dan atau membuat jejaring pasar.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih. Sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022, BPPP ambon masih melakukan identifikasi pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya, sehingga nilai capaiannya masih 0 orang.

Analisis Keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah:

1. Pendampingan bagi lulusan pelatihan oleh penyuluh di Kab/kota sehingga hambatan dalam usaha kelautan dan perikanan dapat diatasi

2. Balai Pelatihan KP berupaya mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui pelatihan online
3. Sistem pendataan purnawidya yang berjalan dan terorganisir
4. Kurikulum kewirausahaan yang sudah diterapkan, sampai diadakannya kompetisi kewirausahaan antar satuan pelatihan KP
5. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan wirausaha ternama.

Indikator Kinerja 5

Tersedianya Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang dibuat oleh Instruktur/ Widyasiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada ditahun 2021. Cara perhitungan ini IKU ini dengan cara mengakumulasi jumlah paket kajiwidya yang dihasilkan oleh BPPP Ambon. Sampai akhir triwulan 2 tahun 2022, BPPP Ambon masih melakukan proses identifikasi materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Ambon sehingga nilai pencapaiannya masih 0 paket.

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan terdapat 3 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 6 : Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha Yang Disuluh Di Satminkal BPPP Ambon, IKU 7 : Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon

(Kelompok), IKU 8 : Kelompok Kelautan dan Perikanan Yang Dibentuk di Satminkal BPPP Ambon dan IKU 9 : Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (orang)

Indikator Kinerja 6

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, pada tahun 2019 sebanyak 34.500 orang, pada tahun 2020 sebanyak 2.686 kelompok dan pada tahun 2021 sebanyak 2.641 kelompok, sampai akhir triwulan 2 tahun 2022 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penyuluhan sebanyak 1.540 kelompok dari target kelompok tahunan yang disuluh sebanyak 2.941 kelompok.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Satminkal dengan Penyuluh Perikanan, pelaporan online penyuluh, SKP yang disertai dengan

dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Analisis Keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah:

1. Kepala BPPP Ambon memberikan surat instruksi/memorandum kepada penyuluh Satminkal terkait pemenuhan kinerja untuk pencapaian IKU tersebut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi tahun 2021 capaian kinerja tahun 2021 sehingga para penyuluh memiliki kinerja yang lebih baik dengan merealisasikan tunjangan kinerjanya dan PPB untuk mengirimkan bukti pembayaran BOP setiap bulannya dan melakukan pembayaran BOP penyuluh PNS maupun PPB secara tepat waktu sebagai bukti bahwa penyuluh telah melakukan penyuluhan kepada kelompok utama/usaha binaannya.
2. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi tahun 2021 capaian kinerja tahun 2021.



Penyuluhan Pada Kelompok Pengolahan di Kota Ambon

Penyuluhan Pada Kelompok
Budidaya Air Tawar di Kab. Kep.
Yapen



Penyuluhan Pada Kelompok Usaha
Bersama di Kab. Seram Bagian
Timur

Indikator Kinerja 7

Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satminkal BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP

Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, tahun 2019 sebanyak 34.500 orang, tahun 2020 sebanyak 240 Kelompok dan tahun 2021 sebanyak 38 kelompok.

Sampai akhir triwulan 2 tahun 2022, Penyuluh Satminkal BPPP Ambon telah melakukan peningkatan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha di Satminkal BPPP Ambon sebanyak 5 kelompok.

Analisis Keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah:

1. Kepala BPPP Ambon memberikan surat instruksi/memorandum kepada penyuluh Satminkal terkait pemenuhan kinerja untuk pencapaian IKU tersebut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi tahun 2021 capaian kinerja tahun 2021 sehingga para penyuluh memiliki kinerja yang lebih baik dengan merealisasikan tunjangan kinerjanya dan PPB untuk mengirimkan bukti pembayaran BOP setiap bulannya dan melakukan pembayaran BOP penyuluh PNS maupun PPB secara tepat waktu sebagai bukti bahwa penyuluh telah melakukan penyuluhan kepada kelompok utama/usaha binaannya dan melakukan kegiatan peningkatan kelas kelompok.
2. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi tahun 2020 capaian kinerja tahun 2021.
3. Penyuluh telah melakukan pendampingan kelompok sampai dengan tahun 2022 ini dan telah mengidentifikasi dan melakukan peningkatan kelas kelompok

terhadap calon kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui pendampingan yang dilakukan.

4. Surat Keputusan dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah telah ditetapkan.



Giat Luhkan Kabupaten Nabire (8 April 2022)
Kelompok yang meningkat kelasnya dari Madya ke Utama yaitu Pokdakan Menara Inaimo Jaya, alamat Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dengan jumlah anggota 13 orang.

Kelompok merupakan Binaan Penyuluh Perikanan Ali Rohmat. Setifikat Peningkatan kelas kelompok disahkan oleh Bupati Kabupaten Nabire.



Indikator Kinerja 8

Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dibentuk dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan

penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan penilaian kelas kelompok. Pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 1.462 unit, tahun 2020 nilai pencapaiannya sebanyak 136 kelompok dan tahun 2021 nilai pencapaiannya sebanyak 130 kelompok, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sampai akhir triwulan 2 tahun 2022, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang ditumbuhkan kelompoknya sebanyak 110 kelompok dari target sebanyak 215 kelompok.

Pembentukan kelompok ditandai dengan penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah, kepala desa atau sejenisnya) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota.

Analisis Keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah:

1. Kepala BPPP Ambon memberikan surat instruksi/memorandum kepada penyuluh Satminkal terkait pemenuhan kinerja untuk pencapaian IKU tersebut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi tahun 2021 capaian kinerja tahun 2021 sehingga para penyuluh memiliki kinerja yang lebih baik dengan merealisasikan tunjangan kinerjanya dan PPB untuk mengirimkan bukti pembayaran BOP setiap bulannya dan melakukan pembayaran BOP penyuluh PNS maupun PPB secara tepat waktu sebagai bukti bahwa penyuluh telah

melakukan penyuluhan kepada kelompok utama/usaha binaanya dan melakukan kegiatan pembentukan kelompok.

2. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi tahun 2021 capaian kinerja tahun 2021.
3. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2022.



Penumbuhan kelompok di
Kabupaten Halmahera Selatan

Penumbuhan kelompok di
Kabupaten Maluku Tengah



Indikator Kinerja 9

Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BRSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu, Penyuluh Swadaya, UMKM yang disuluh, dan P2MKP.

Perhitungan ini berdasarkan penjumlahan seluruh tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BPPP Ambon dan capaiannya akan dilakukan pada akhir tahun 2022 sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP terdapat 2 (dua) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 10 : Desa/kawasan Mitra Yang Menerapkan Iptek di BPPP Ambon (desa) dan IKU 11 : Jumlah Percontohan Penyuluhan KP yang Diterapkan di Satminkal BPPP Ambon.

Indikator Kinerja 10

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014).

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna. Teknologi merupakan materi konkret (*hard* atau *soft*) pengetahuan untuk penggunaan praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya. Desa mitra adalah desa komunitas kp yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kp.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibuktikan dengan MOU/PKS antara Kepala Badan RSDMKP dengan Bupati/Walikota. Sampai akhir triwulan I Tahun 2022, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi kerjasama dengan Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP sehingga nilai pencapaiannya masih 0 paket.

Program Desa mitra/Kawasan mitra Kelautan dan Perikanan bertujuan:

1. Mendayagunakan iptek untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat (desa);
2. Membangun hubungan interaksi antara dunia iptek (*research and development*) dengan dunia usaha di masyarakat (desa);
3. Mendorong masyarakat (desa) untuk mengikuti perkembangan iptek agar usaha masyarakat desa berkembang dan berkelanjutan;
4. Menciptakan produk unggulan spesifik desa (daerah) yang berkualitas; dan

5. Meningkatkan daya saing usaha masyarakat (desa) melalui pemanfaatan iptek kelautan dan perikanan.

Tahapan kegiatan untuk mewujudkan desa inovasi/desa mitra ini meliputi koordinasi dan survei, identifikasi dan penetapan teknologi, perakitan, introduksi teknologi, alih teknologi, pendampingan proses alih teknologi, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Desa mitra/kawasan mitra yang ditetapkan diberikan teknologi dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan. Pemanfaatan tersebut dapat terlihat dari terdiseminaskannya teknologi dan atau kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset Perikanan kepada stakeholder di desa. Selain itu, dapat pula memberikan masukan penetapan kebijakan riset dari umpan balik stakeholders sehingga dihasilkan teknologi dan atau kebijakan yang bersifat inovatif dan tepat guna.

Indikator Kinerja 11

Jumlah percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di BPPP Ambon (Produk).

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan. Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan Identifikasi jumlah percontohan penyuluhan KP. IKU ini sudah ada pada tahun 2019 dengan pencapaian sebanyak 2 kelompok, pada tahun 2020 sebanyak 1 kelompok dan pada tahun 2021 sebanyak 1 Paket.

Sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022, BPPP ambon sudah melakukan kegiatan percontohan penyuluhan KP dikelompok Patin Karya Sejati dengan jenis inovasi pembesaran ikan nila dengan pemberian pakan mandiri di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua, akan tetapi sampai saat ini masih dalam proses pembesaran dan belum mencapai masa panen sehingga pencapaian masih 0 produk.

Analisis Keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah: Kepala BPPP Ambon memberikan surat instruksi/memorandum kepada penyuluh Satminkal terkait pemenuhan kinerja untuk pencapaian IKU tersebut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi tahun 2021 capaian kinerja tahun 2021 sehingga para penyuluh memiliki kinerja yang lebih baik dengan merealisasikan tunjangan kinerjanya dan PPB untuk mengirimkan bukti pembayaran BOP setiap bulannya dan melakukan pembayaran BOP penyuluh PNS maupun PPB secara tepat waktu sebagai bukti bahwa penyuluh telah melakukan penyuluhan.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP terdapat 2 (dua) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 12 : Jumlah Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon (Unit) dan IKU 13 : Jumlah Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon (Unit).

Indikator Kinerja 12

Jumlah sarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. Sampai triwulan 2 Tahun 2022, BPPP ambon telah melakukan tahap pengadaan sarana sebagai penunjang pelatihan dan penyuluhan KP sehingga nilai pencapaiannya telah 1 paket.

PERALATAN DAN MESIN



Pengadaan sarana penunjang pelatihan dan penyuluhan KP

Indikator Kinerja 13

Jumlah prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Prasarana yang berbentuk pembangunan dan renovasi bangunan/belanja modal. Sampai triwulan 2 Tahun 2022, BPPP Ambon telah selesai melakukan tahap pengadaan prasarana sehingga nilai pencapaiannya telah 1 paket.



Pengadaan prasarana penunjang pelatihan dan penyuluhan KP

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon

Untuk mencapai Sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon terdapat 9 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 14 : Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon, IKU 15 : Unit Kerja BPPP Ambon Yang Dibangun Untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

(WBK), IKU 16 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon, IKU 17 : Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon, IKU 18 : Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon, IKU 19 : Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK BPPP Ambon Dibandingkan Realisasi Anggaran BPPP Ambon TA. 2021, IKU 20 : Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPPP Ambon, IKU 21 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon dan IKU 22 : Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon.

Indikator Kinerja 14

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%).

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon berupa tersedianya laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon.

Perhitungan Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon ini dihitung berdasarkan pemenuhan laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon berupa laporan tahunan, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dan laporan keuangan.

Perhitungan ini dilakukan pada akhir tahun, sehingga nilai pencapaian masih 0 %. Adapun dokumen yang harus disediakan pada akhir tahun terdiri dari pemenuhan 26 dokumen yaitu :

- 4 dokumen SPIP
- 1 Laporan PIPK
- 1 dokumen laporan BMN
- 12 dokumen laporan bulanan

- 1 Dokumen laporan tahunan
- 1 Dokumen laporan program dan kegiatan
- 1 Dokumen laporan evaluasi unit percontohan
- 1 Dokumen Simlat
- 1 Dokumen evaluasi desa inovasi

Indikator Kinerja 15

Unit Kerja BPPP Ambon Yang Dibangun Untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) (Satker)

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik, Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum diusulkan. IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2022. Perhitungan Unit Kerja BPPP Ambon Yang Dibangun Untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) adalah Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses.

Perhitungan ini dilakukan pada akhir tahun 2022 dengan melengkapi seluruh persyaratan indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses minimal 75 pada Zona Integritas (ZI), sehingga nilai pencapaian masih 0 %.

Analisis keberhasilan dari IKU ini adalah :

1. Telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM BPPP Ambon sesuai SK Nomor : KEP.128/BPPP/AMB/OT.210/I/2022 Tanggal 11 Januari 2022.
2. Pemenuhan persyaratan indikator hasil WBK sampai bulan Maret 2022 sesuai dengan *Time Line* yang telah diberikan sehingga diharapkan pada akhir tahun 2022 seluruh persyaratan sudah dapat dilengkapi

Indikator Kinerja 16

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (nilai).

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu:

- Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
- Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2022 pada aplikasi kinerjaku

Sampai akhir triwulan 2 tahun 2022, BPPP Ambon belum dilakukan penilaian rekonsiliasi kinerja yang dilakukan oleh Sekertaris BRSDM KP sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Indikator Kinerja 17

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Jumlah unit kerja yang tergabung dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Btrix*. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 70,80 % dan tahun 2018 sebesar 95,23%, tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100% dan tahun 2021 sebesar 100%. Sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh Puslat KP dan diperoleh nilai sebagai berikut :

- = Pemenuhan Dokumen MP yang sudah diupload dalam aplikasi Btrix + Keikutsertaan MP dalam aplikasi Btrix +Keaktifan MP dalam aplikasi Btrix
- = 20 + 40+ 40
- = 100%

Perolehan nilai tersebut dikarenakan keaktifan para pejabat dalam menshare manajemen pengetahuan secara kontinyu pada aplikasi Bitrix KKP dan pemenuhan dokumen kinerja yang diupload pada aplikasi Bitrix KKP.

Adapun Permasalahan pada IKU ini disebabkan sebagai berikut:

1. Ada Revisi PK BPPP Ambon
2. Input data ke dalam aplikasi bitrix24 kkp harus memuat unsur 5W1H

Indikator Kinerja 18

Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks).

Indeks profesionalitas ASN dimaksud terdiri dari Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 81,51 % dan tahun 2018 sebesar 93,25%, tahun 2019 sebesar 75,88%, tahun 2020 sebesar 76,28% dan tahun 2021 sebesar 77,18%. Perhitungan ini juga dapat dilihat melalui website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon> dengan perhitungan nilai sebagai berikut :

= Indeks kualifikasi pendidikan ASN + Indeks disiplin ASN + Indeks kinerja ASN +
Indeks kompetensi ASN

Sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 BPPP ambon telah melakukan input data kepegawaian kedalam aplikasi epegawai masing-masing pegawai dan metode penilaiannya dilaksanakan pada akhir tahun, sosialisasi tentang komponen yang harus diisi pada aplikasi e-pegawai yang akan terhubung dengan Ropeg KKP oleh setiap ASN BPPP Ambon dengan nilai capaian sebesar 73,47 %.

Analisa ketercapaian Indikator ini karena dukungan seluruh pegawai di lingkup BPPP Ambon, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai. Media sosial *Whatsapp* menjadi salah satu alat komunikasi untuk penyampaian pemutakhiran data, dan memonitor pergerakan nilai sehingga target IKU ini dapat tercapai.

Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, namun dengan berbagai upaya target Nilai IP ASN BPPP Ambon ini diharapkan dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan secara daring. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan atau keberhasilan tercapainya target Nilai IP ASN BPPP Ambon ini antara lain disebabkan oleh:

1. Terdapat pegawai lingkup BPPP Ambon yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;
3. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
4. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan

Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.

Indikator Kinerja 19

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK BPPP Ambon Dibandingkan Realisasi Anggaran BPPP Ambon TA 2021 (%).

Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Ambon dibandingkan realisasi tahun 2021.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebesar 0 %, pada tahun 2019 juga sebesar 0%, pada tahun 2020 sebesar 0,01% dan pada tahun 2022 sebesar 0,01%.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BRSDM KP yang dihitung akhir tahun 2022. Perhitungan ini berdasarkan total temuan nilai kepatuhan dibandingkan dengan pagu total sehingga pencapaian nilai untuk IKU ini masih 0%.

Indikator Kinerja 20

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja 70 BPPP Ambon (%)

Merupakan indikator jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d Triwulan III Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti secara

tuntas (status tindak lanjut lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Cara perhitungan IKU ini dengan cara Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 70% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\% \text{ Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Sudah Ditindaklanjuti Secara Tuntas}} \times 100\%$$

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BRSDM KP yang telah dihitung pada triwulan 1 tahun 2022 dan BPPP Ambon sudah menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan yang dilakukan oleh Itjen pada saat dilakukan audit, reviu dan evaluasi sehingga pencapaian nilai untuk IKU ini telah 100%.

Indikator Kinerja 21

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon (nilai).

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, tahun 2020 sebesar 92,83% dan tahun 2021 sebesar 97,44%

Terdapat 12 indikator penilaian yaitu: Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan Rekon LPJ, Renkas, Realisasi, PAGU Minus dan Dispensasi SPM.

Perolehan nilai ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi OM SPAN BPPP Ambon dan capaiannya akan dilakukan pada akhir tahun 2022 sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Indikator Kinerja 22

Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon (nilai).

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, pada tahun 2020 sebesar 92,03% dan pada tahun 2021 sebesar 85,58%.

Perhitungan ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi SMART DJA dan capaiannya akan dilakukan pada akhir tahun 2022 sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

C. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BPPP Ambon pada Tanggal 30 Juni 2022, dapat dilihat pada tabel 24 berikut :

Tabel 24. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
032.12	PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	51.608.987.000	24.439.442.311	27.169.544.689	47,36
032.12.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VAKASI	7.464.433.000	3.539.824.556	3.924.608.444	47,42
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7.464.433.000	3.539.824.556	3.924.608.444	47,42
2375.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	180.000.000	122.321.347	57.678.653	67,96
2375.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.761.580.000	2.390.966.184	2.370.613.816	50,21
2375.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	54.019.000	53.240.000	779.000	98,56
2375.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	550.000.000	549.188.500	811.500	99,85
2375.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.918.834.000	424.108.525	1.494.725.475	22,10
032.12.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	44.144.554.000	20.899.617.755	23.244.936.245	47,34
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	44.144.554.000	20.899.617.755	23.244.936.245	47,34
2378.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	43.989.343.000	20.847.001.704	23.142.341.296	47,39
2378.EBD	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	155.211.000	52.616.051	102.594.949	33,90

Secara umum kinerja BPPP Ambon triwulan 2 tahun 2022 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi kepada penyuluh PNS dan PPB Satminkal BPPP Ambon tentang mekanisme pembayaran BOP sehingga anggaran BOP Penyuluh PNS dan PPB dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.

Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Ambon disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

Tabel 25. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1.918.834.000	424.108.525	22,10
2	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	120.000.000	96.450.009	80,38
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan da Perikanan	4.761.580.000	2.390.966.184	50,21
4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	60.000.000	25.871.338	43,12
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	604.019.000	602.428.500	99,74
6	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	44.144.554.000	20.847.001.704	47,34
7	Ekonomi Sektor KP Meningkat BPPP Ambon	273.234.000	112.090.848	41,02
TOTAL		51.608.987.000	24.439.442.311	47,36

D. Efisiensin Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung- jawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (*entrepreneur*). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Hasil perhitungan efisiensi anggaran BPPP Ambon sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 26. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPPP Ambon Triwulan 2 Tahun 2022

Unit Kerja	Jumlah IKU	NPSS	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	% Efisiensi Anggaran
BPPP Ambon	22	104,52	51.608.987.000	24.439.442.311	47,36	91,72

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada BPPP Ambon yaitu;

- a. Perencanaan, efisiensi anggaran dilakukan BPPP Ambon dalam beberapa dimensi, yaitu:

Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya.

Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2021 BPPP Ambon telah menetapkan kegiatan prioritas yang pengawalannya dilakukan secara rutin (*weekly report*) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai.

Dimensi efisiensi ketiga berupa pemangkasan alokasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan. dialihkan kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal ini dukungan untuk prioritas nasional/KKP dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Disamping itu, pada masa pandemi Covid-19, pos-pos anggaran yang tercatat berlebih diantaranya belanja pegawai dialihkan untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya.

- b. Pelaksanaan, strategi pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi terutama dalam hal perjalanan dinas/paket meeting, sehingga volume capaian dapat melebihi target atau dipergunakan untuk output baru. Implementasi efisiensi ini diantaranya berupa:

- Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan berbasis daring;
- Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan evaluasi dilaksanakan secara daring dan blended (tatap muka dan daring);

- Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui video conference *dan live streaming*;
- Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan pimpinan berbasis *Balance Score Card* dan SKP;
- Membayarkan biaya operasional Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai kinerja yang dilaporkan dan sepengetahuan Kepala Dinas KP sebagai pengguna.
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung program prioritas Eselon I KKP.

c. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran agar tepat Penggunaan dan sesuai aturan perundangundangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev Bappenas, E- Dalwas KKP, Kinerjaku KKP, E-Pegawai KKP, serta Dashboard dan Weekly Report BPPP Ambon;
- Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.

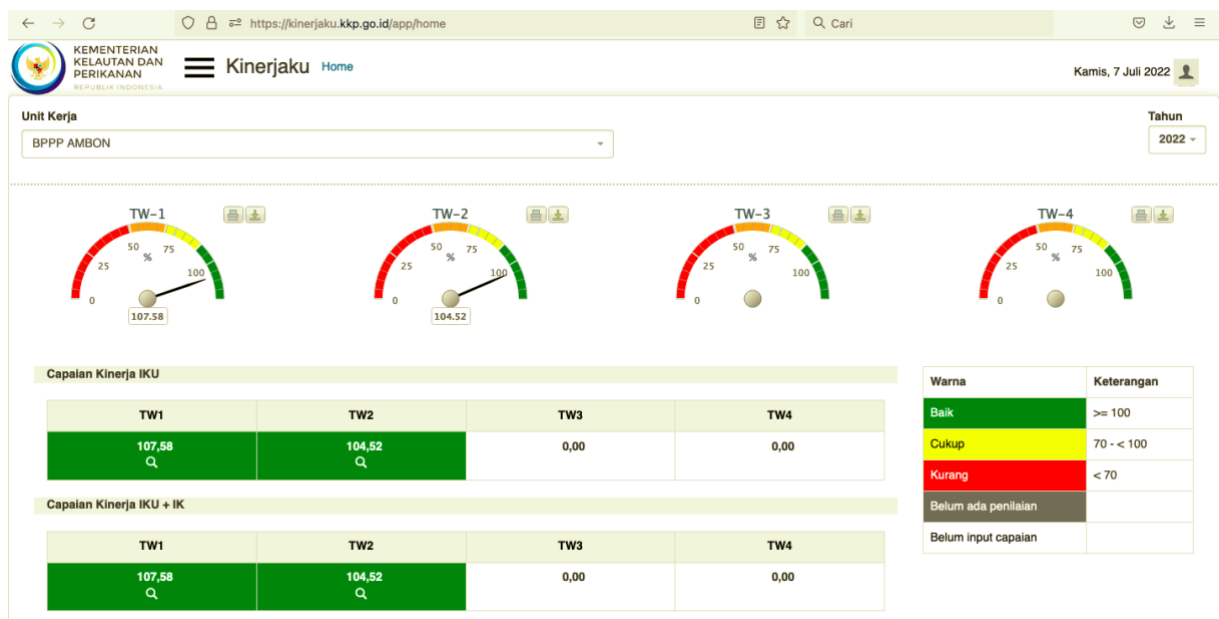
d. Penyesuaian

Pelaksanaan revisi indikator, target/volume kinerja dan anggaran dilakukan bila dari hasil revidi diperlukan perubahan, penambahan, dan pergeseran bila diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. BPPP Ambon melakukan beberapa penyesuaian diantaranya melakukan proses identifikasi dan revisi 1) mendukung program prioritas nasional dalam rangka peningkatan produksi budidaya, 2) pergeseran output belanja pegawai untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 di lingkup KKP, 3) belanja perjalanan di internal BPPP Ambon untuk mendukung kegiatan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 (pelatihan masyarakat).

BAB IV PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

Pada akhir triwulan 2 tahun 2022, BPPP Ambon memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 7 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon triwulan 2 tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat tahun 2022 sebesar 104,52%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama triwulan II tahun 2022, dari 8 IKU yang menjadi target BPPP Ambon, dan semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan ada 2 IKU yang merupakan IKU tahunan akan tetapi sudah terealisasi pada triwulan ini. Rincian target dan realiasi dari 10 IKU tersebut adalah:

- 1) IKU 2 : Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon, sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 BPPP Ambon sudah melakukan pelatihan kepada masyarakat kelautan dan perikanan sebanyak 796 orang dari target masyarakat yang dilatih triwulan 2 tahun 2022 sebanyak 796 orang.
- 2) IKU 3 : Nilai PNBP Satker BPPP Ambon, sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini sebesar 0,25 Milyar dari target triwulan 2 tahun 2022 sebesar 0,08 Milyar.
- 3) IKU 6 : Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon, sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penyuluhan kepada kelompok pelaku utama/pelaku usaha sebanyak 1.540 kelompok dari target kelompok yang disuluh triwulan 2 tahun 2022 sebanyak 1.540 kelompok.
- 4) IKU 7 : Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon, sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 Penyuluh Satminkal BPPP Ambon sudah melakukan peningkatan kelas kelompok kelautan dan perikanan sebanyak 5 kelompok dari target kelompok yang dibentuk triwulan 2 tahun 2022 sebanyak 5 kelompok.
- 5) IKU 8 : Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon, sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 Penyuluh Satminkal BPPP Ambon

sudah melakukan pembentukan kelompok kelautan dan perikanan sebanyak 110 kelompok dari target kelompok yang dibentuk triwulan 2 tahun 2022 sebanyak 110 kelompok.

- 6) IKU 12 : Jumlah sarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon, BPPP ambon telah selesai melakukan tahap pengadaan sarana sehingga nilai pencapaiannya telah 1 paket.
- 7) IKU 13 : Jumlah prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon, BPPP ambon telah selesai melakukan tahap pengadaan prasarana sehingga nilai pencapaiannya telah 1 paket.
- 8) IKU 17 : Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon, sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh Puslat KP dan diperoleh nilai 100% dari target sebesar 86%.
- 9) IKU 18 : Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon, sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini sebesar 73,47% dari target pada triwulan 2 Tahun 2022 sebesar 72%.
- 10) IKU 18 : Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon, sampai akhir triwulan 2 Tahun 2022 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh Sekertaris BRSDM KP dan diperoleh nilai 100% dari target sebesar 70%.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi tahun 2021 capaian kinerja tahun 2021, untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BPPP Ambon, telah dilakukan sinkronisasi pemahaman dari pegawai yang menangani aplikasi SAS dalam mengukur capaian *output* dari RO. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi pada triwulan 2 tahun 2022 antara lain :

1. Penetapan target nilai IP ASN sebesar 76, perlu mendapatkan perhatian, mengingat komposisi dan kualifikasi Pendidikan pegawai mempengaruhi terhadap pencapaian IKU IP ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi pemenuhan nilai IP ASN kepada seluruh pegawai BPPP Ambon meliputi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai.

2. IKU dengan Target Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Januari 2022

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
SK 1.1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	ISK 1.1.1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	65
		ISK 1.1.2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.719
SK 1.2	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	ISK 1.2.1	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	12
		ISK 1.2.2	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2
SK 1.3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	ISK 1.3.1	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.941
		ISK 1.3.2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	67
		ISK 1.3.3	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	215
SK 1.4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	ISK 1.4.1	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Paket)	1
		ISK 1.4.2	Jumlah Percontohan Penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (Produk)	1
SK 1.5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	ISK 1.5.1	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
		ISK 1.5.2	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM				
SK 2.1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	ISK 2.1.1	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		ISK 2.1.2	Unit Kerja BPPP Ambon yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		ISK 2.1.3	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	92
		ISK 2.1.4	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	86
		ISK 2.1.5	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	76
		ISK 2.1.6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2021 (%)	≤1
		ISK 2.1.7	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	70

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		ISK 2.1.8	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	89
		ISK 2.1.9	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	86
SK 2.2	Ekonomi Sektor KP meningkat BPPP Ambon	ISK 2.2.1	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Milyar)	0,405
		ISK 2.2.2	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	550

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan KP	
SK 1.1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1.918.834.000
SK 1.2	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	120.000.000
SK 1.3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4.761.580.000
SK 1.4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	60.000.000
SK 1.5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	604.019.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM	
SK 2.1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	460.311.000
SK 2.2	Ekonomi Sektor KP meningkat lingkup BPPP Ambon	43.684.243.000
Total Anggaran BPPP Ambon		51.608.987.000

Jakarta, 21 Januari 2022

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Mei 2022

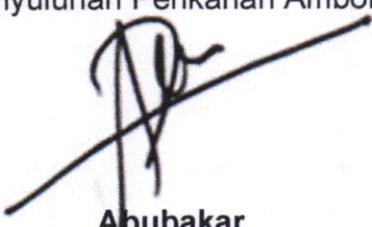
Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon


Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	65
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.719
		3	Nilai PNBPN Satker BPPP Ambon (Rupiah Milyar)	0,405
2	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	4	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	12
		5	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.941
		7	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	67
		8	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	215
		9	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	550
4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa)	1
		11	Jumlah Percontohan Penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (Produk)	1
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM				
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		15	Unit Kerja BPPP Ambon yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	92
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	86
		18	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	76
		19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2021 (%)	≤1

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	70
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	86

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan KP	
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1.918.834.000
2	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	120.000.000
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	48.445.823.000
4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	60.000.000
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	604.019.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM	
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	460.311.000
Total Anggaran BPPP Ambon		51.608.987.000

Jakarta, 12 Mei 2022

Pihak Kedua

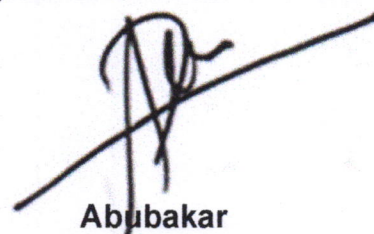
Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan



 Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon



Abubakar



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPPP AMBON
NOMOR : KEP.21/BPPP.AMB/OT.210/I/2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2021
DAN TRIWULAN TAHUN 2022 BPPP AMBON

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2022 dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Triwulan Tahun 2022.
2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 06/MEN-SJ/KP.430/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.41/MEN/KU.611/2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut dalam kolom 2 dan 3 pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon.

Kedua

- Kedua** : Biaya untuk keperluan Laporan Kinerja (LKj) dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2022 tanggal 17 November 2021 BPPP Ambon T.A. 2022.
- Ketiga** : Kepada mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut pada amar pertama, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala BPPP Ambon.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



Abubakar S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
UP. – DIRJEN Anggaran di Jakarta. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
3. Sekretaris Badan Riset SDM-KP di Jakarta.
4. Kapus Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah XXIX Dirjen Anggaran Ambon di Ambon.
7. KPPN Ambon di Ambon.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran BPPP Ambon
Nomor : KEP.21/BPPP.AMB/OT.210/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
BPPP Ambon T.A. 2022**

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas / Keterangan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data / Ketua	merencanakan, menyusun, memeriksa LKj dan mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Program Dan Monev
2.	Pirhel, S.Sos, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari subbagian Tata Usaha
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Pelatihan
4.	A.R. Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Penyuluhan
6.	Moh. Arief Hidayat, A.Md	Sekretaris	menyusun laporan kinerja (LKj)
7.	Fiona A.B. Nikyuluw, S.Pi, M.Si	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)
8.	Dessy Rompis	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)
9.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001